



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT DAERAH

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
TAHUN 2025**

"Nasudhaiva Kutumbakam"

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan media utama yang menuangkan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Perubahan Renja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Denpasar. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja ini, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar, dan kami berharap penyusunan Perubahan Renja ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja dan nantinya dapat direalisasikan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Denpasar, 11 Juni 2025

Inspektur Daerah Kota Denpasar

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650726 199201 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025.....	11
BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025.....	23
BAB IV PENUTUP.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	15
Tabel 3.1 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025.....	24

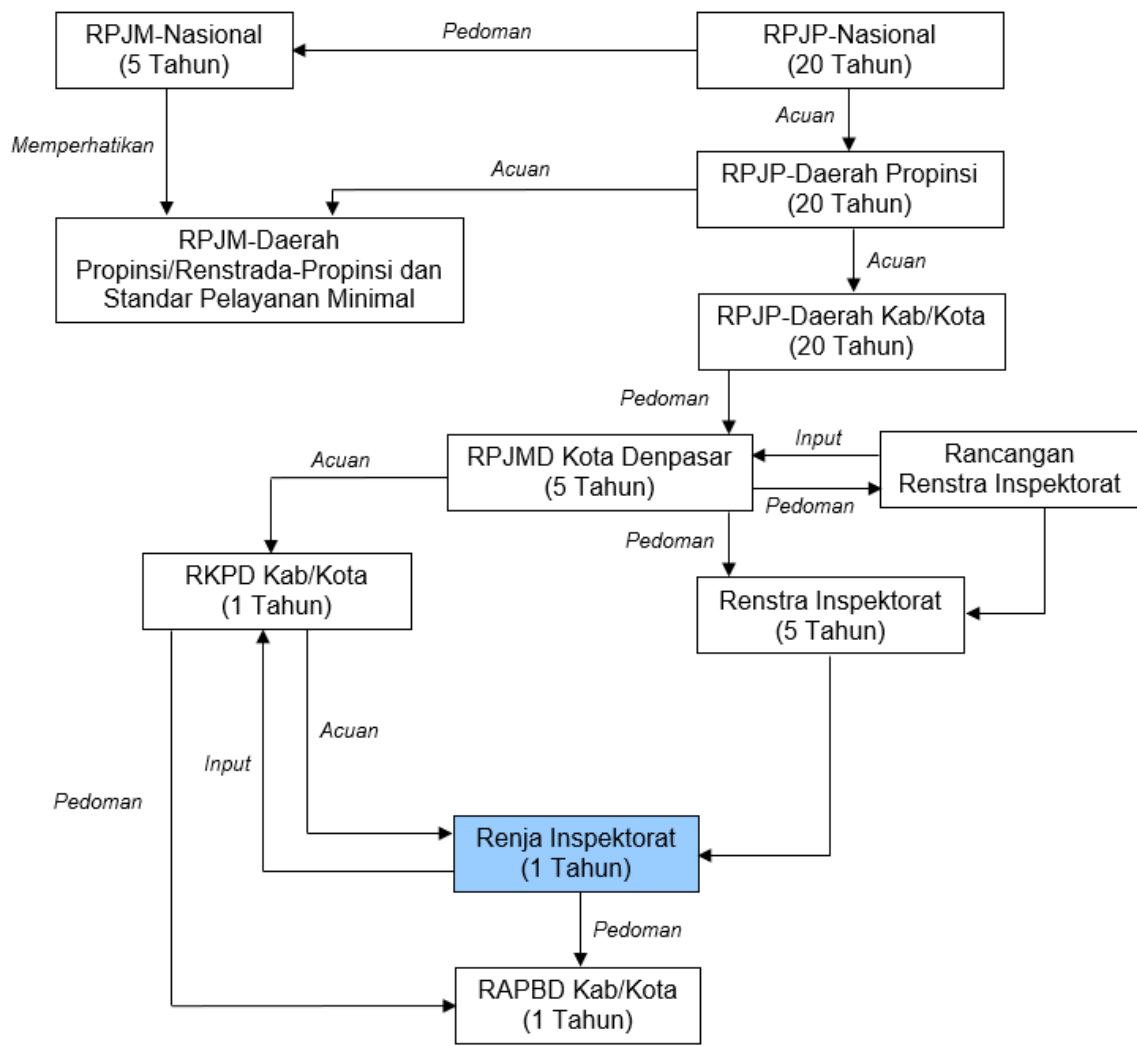
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, untuk mengoperasionalkan RKPD dan berupaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar. Visi pembangunan Kota Denpasar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu: **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**. Visi ini secara filosofis dilandasi oleh filsafat Tri Hita Karana, yaitu harmoni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Kerangka filosofis ini diadopsi dan diadaptasi menjadi kerangka dasar.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar No. 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, dan menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan fungsi di atas, Inspektorat Kota Denpasar menyusun dokumen Rencana Kerja yang mengacu pada misi ke tiga Pemerintah Kota Denpasar yaitu **“Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas Inspektorat Kota Denpasar menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah merupakan pedoman pelaksanaan program kerja / kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang disusun berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;

20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
26. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana

- Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
27. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 32);
28. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Denpasar dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah tahun 2021 – 2026 serta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Tujuan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pengawasan pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan Ingacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah; kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM & KEGIATAN

Rencana Kerja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

Secara umum Inspektorat Daerah Kota Denpasar melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021 – 2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun awal dari masa berlaku Renstra 2021 – 2026, yang sekaligus merupakan dukungan terhadap pencapaian target – target RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 diawali dengan melaksanakan evaluasi tingkat capaian pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Evaluasi ini menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah Kota Denpasar dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dan sasaran RKPD serta RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan pertimbangan :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar program.
3. Adanya keadaan luar biasa yang mengharuskan adanya perubahan pengeluaran yang dapat mempengaruhi APBD.

Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hasil evaluasi ini meliputi seluruh program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 alokasi anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut.

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran Induk	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III
1.	Total Belanja APBD Pergeseran 2025	3.590.924.704.365	3.590.924.704.365	3.591.015.904.365	3.591.015.904.365
2.	Total Pagu Inspektorat Daerah Kota Denpasar	39.237.206.784	40.118.116.523	35.670.451.301	35.670.451.301
	2a. Anggaran Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	21.281.728.844	22.162.638.583	21.335.574.361	21.335.574.361
	2b. Anggaran Diklat	5.280.834.000	5.280.834.000	3.280.834.000	3.280.834.000
	2c. Anggaran Sarana dan Prasarana Rutin	8.832.867.940	8.832.867.940	8.799.467.940	8.799.467.940
	2d. Anggaran Program Pengawasan	3.841.776.000	3.841.776.000	2.254.575.000	2.254.575.000
3.	Total Anggaran Pengawasan (2b+2c+2d)	17.955.477.940	17.955.477.940	14.334.876.940	14.334.876.940
4.	Persentase Anggaran Pengawasan terhadap APBD Kota Denpasar (3/1)	0,50%	0,50%	0,40%	0,40%

Pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah disebutkan “untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c) diatas Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja dan diatas Rp.15.000.000.000, (lima belas miliar);

Anggaran Induk Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 telah memenuhi amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dimana proporsi anggaran pengawasan adalah 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja APBD Kota Denpasar. Per triwulan I Tahun 2025 anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Denpasar terhadap APBD Kota Denpasar adalah 0,40% (nol koma empat puluh

persen) dimana beberapa kegiatan mengalami dampak efisiensi yang menyebabkan kebutuhan anggaran pengawasan belum memadai dan tidak sesuai dengan amanat yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, hal ini adalah implementasi atas tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inspektorat Daerah Kota Denpasar mengelola Anggaran Pergeseran III (Per Triwulan I) di Tahun 2025 sebesar Rp.35.670.451.301 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 29.835.906.301 dan Belanja Modal sebesar Rp. 5.834.545.000 dengan melaksanakan 3 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 total realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kota Denpasar adalah sebesar Rp.5.643.512.640 atau sebesar 15,82% dari total anggaran per triwulan I. Adapun rincian evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
	INSPEKTORAT DAERAH			35.670.451.301		5,643,512,640	30,026,938,661
6.01.6.01.0.00.00 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	33,415,876,301	29%	5,638,947,640	27,776,928,661
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	21,335,574,361	25%	5,159,353,870	16,176,220,491
6.01.6.01.0.00.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan	21,335,574,361	77 Orang/bulan	5,159,353,870	16,176,220,491
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	3,280,834,000	25%	102,376,348	3,178,457,652

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.001.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 orang	3,280,834,000	25 orang	102,376,348	3,178,457,652
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	849,723,980	23%	67,883,964	781,840,016
6.01.6.01.0.00.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,249,000	20%	-	18,249,000
6.01.6.01.0.00.001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	124,625,500	25%	12,623,000	112,002,500
6.01.6.01.0.00.001.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	98,604,230	20%	-	98,604,230
6.01.6.01.0.00.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	144,788,250	25%	14,810,900	129,977,350

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	120,651,000	20%	-	120,651,000
6.01.6.01.0.00.00 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	14,400,000	25%	2,430,000	11,970,000
6.01.6.01.0.00.001.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	158,600,000	25%	6,100,000	152,500,000
6.01.6.01.0.00.00 1.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	169,806,000	25%	31,920,064	137,885,936
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,261,045,000	25%	-	2,261,045,000
6.01.6.01.0.00.001.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	35 Unit	2,261,045,000	25%	-	2,261,045,000

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,675,118,960	25%	229,037,308	1,446,081,652
6.01.6.01.0.00.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	196,800,000	25%	33,155,092	163,644,908
6.01.6.01.0.00.001.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	112,560,000	25%	-	112,560,000
6.01.6.01.0.00.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1,365,758,960	25%	195,882,216	1,169,876,744
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,013,580,000	25%	80,296,150	3,933,283,850
6.01.6.01.0.00.001.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52,300,000	25%	7,500,000	44,800,000

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	30 Unit	438,780,000	25%	60,713,800	378,066,200
6.01.6.01.0.00.001.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	3,522,500,000	25%	12,082,350	3,510,417,650
6.01.6.01.0.00.00 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP	Level 3; Level 3	849,856,000	20%	1,350,000	848,506,000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	764,536,000	19%	1,350,000	763,186,000
6.01.6.01.0.00.002.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	511,857,000	20%	1,350,000	510,507,000
6.01.6.01.0.00.002.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	81,237,000	25%	-	81,237,000

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.002.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	9,823,500	20%	-	9,823,500
6.01.6.01.0.00.002.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	111,377,000	25%	-	111,377,000
6.01.6.01.0.00.002.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	16,669,500	-	-	16,669,500
6.01.6.01.0.00.002.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	33,572,000	25%	-	33,572,000
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	85,320,000	20%	-	85,320,000
6.01.6.01.0.00.002.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	1 Laporan	14,182,000	20%	-	14,182,000

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.002.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	71,138,000	20%	-	71,138,000
6.01.6.01.0.00.003.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	80 %	1,404,719,000	24%	3,215,000	1,401,504,000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100%	48,846,000	23%	2,315,000	46,531,000
6.01.6.01.0.00.003.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomen-dasi	9,224,000	25%	2,315,000	6,909,000
6.01.6.01.0.00.003.2.01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2 Rekomen-dasi	39,622,000	20%	-	39,622,000
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100%	1,355,873,000	25%	900,000	1,354,973,000

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.003.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	36 Perangkat Daerah	67,928,000	25%	900,000	67,028,000
6.01.6.01.0.00.003.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	51,907,000	25%	-	51,907,000
6.01.6.01.0.00.003.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1,000,682,000	25%	-	1,000,682,000
6.01.6.01.0.00.003.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 Perangkat Daerah	235,356,000	25%	-	235,356,000
TOTAL				35.670.451.301		5,643,512,640	30,026,938,661

BAB III

RENCANA KERJA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar maka diperlukan adanya perubahan yang memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan yang sudah berjalan. Pada dasarnya, dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan Rencana Kerja Induk Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dari segi jumlah 3 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Dengan terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja dimana anggaran induk Tahun 2025 sebesar Rp. 39.237.206.784 dan anggaran Pergeseran IV sebesar Rp. 37.310.674.908.

Dalam hal perubahan anggaran terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.269.186.244 yang sebelumnya pagu Anggaran Pergeseran IV sebesar Rp. Rp.37.310.674.908 pada pagu perubahan menjadi Rp.37.579.861.152, penambahan dialokasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan adanya penambahan Pajak Tunjangan serta Gaji dan Tunjangan PPPK. Rincian Plafon Anggaran Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						39.237.206.784	40.118.116.523	35.670.451.301	35.670.451.301	37.310.674.908	37.579.861.152	269.186.244
6.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretaria- tan	Persentase pemenuhan layanan kesekretarian	100%	100%		35.395.430.784	36.276.340.523	33,415,876,301	33,415,876,301	35.056.099.908	35.604.286.152	548.186.244
6.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		21.281.728.844	22.162.638.583	21,335,574,361	21,335,574,361	22.820.107.688	23.089.293.932	269.186.244
6.01.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang /bulan	94 orang /bulan	DAU dan APBD Kota Denpasar	21.281.728.844	22.162.638.583	21,335,574,361	21,335,574,361	22.820.107.688	23.089.293.932	269.186.244

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
		Tunjangan ASN											
6.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%		5.280.834.000	5.280.834.000	3,280,834,000	3,280,834,000	3.280.834.000	3.280.834.000	-
6.01.0 1.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 orang	78 orang	APBD Kota Denpasar	5.280.834.000	5.280.834.000	3,280,834,000	3,280,834,000	3,280,834,000	3.280.834.000	-
6.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		863.923.980	863.923.980	849,723,980	849,723,980	849,723,980	858.223.980	8.500.000
6.01.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	1 Paket	1 Paket	APBD Kota Denpasar	18.249.000	18.249.000	18,249,000	18,249,000	18,249,000	18.249.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
		Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan										
6.01.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	APBD Kota Denpasar	136.125.500	136.125.500	124,625,500	124,625,500	124,625,500	124.625.500	-
6.01.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	APBD Kota Denpasar	98.604.230	98.604.230	98,604,230	98,604,230	98,604,230	98.604.230	-
6.01.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	APBD Kota Denpasar	144.788.50	144.788.50	144,788,250	144,788,250	144,788,250	144.788.250	-
6.01.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	APBD Kota Denpasar	120.651.000	120.651.000	120,651,000	120,651,000	120,651,000	120.651.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6.01.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	APBD Kota Denpasar	14.400.000	14.400.000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14.400.000	-
6.01.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	APBD Kota Denpasar	158.600.000	158.600.000	158,600,000	158,600,000	158,600,000	167.100.000	8.500.000
6.01.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	172.506.000	172.506.000	169,806,000	169,806,000	169,806,000	169.806.000	-
6.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%		2.261.045.000	2.261.045.000	2,261,045,000	2,261,045,000	2,261,045,000	2.531.545.000	270.500.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
	Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah										
6.01.0 1.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit	APBD Kota Denpasar	2.261.045.000	2.261.045.000	2,261,045,000	2,261,045,000	2,261,045,000	2.531.545.000	270.500.000
6.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		1.694.318.960	1.694.318.960	1,675,118,960	1,675,118,960	1.830.809.240	1.830.809.240	-
6.01.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	216.000.000	216.000.000	196,800,000	196,800,000	196,800,000	196.800.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
		yang Disediakan											
6.01.0 1.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perelengkapa n Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perelengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	112.560.000	112.560.000	112,560,000	112,560,000	112,560,000	112.560.000	-
6.01.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	1.365.758.960	1.365.758.960	1,365,758,960	1,365,758,960	1.521.449.240	1.521.449.240	-
6.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		4.013.580.000	4.013.580.000	4,013,580,000	4,013,580,000	4,013,580,000	4.013.580.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025					Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6.01.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	APBD Kota Denpasar	52.300.000	52.300.000	52,300,000	52,300,000	52,300,000	52.300.000	-
6.01.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	APBD Kota Denpasar	438.780.000	438.780.000	438,780,000	438,780,000	438,780,000	438.780.000	-
6.01.0 1.2.09. 0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	5 Unit	APBD Kota Denpasar	3.522.500.000	3.522.500.000	3,522,500,000	3,522,500,000	3,522,500,000	3.522.500.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
	Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi										
6.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP	Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP	Level 3; Level 3	Level 3; Level 3		1.603.926.000	1.603.926.000	849,856,000	849,856,000	849,856,000	561.856.000	-288.000.000
6.01.0 2.2.01. 0001	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelengga raan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggara an Pengawasan Internal	100%	100%		1.518.606.000	1.518.606.000	764,536,000	764,536,000	764,536,000	476.536.000	-288.000.000
6.01.0 2.2.01. 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	1.058.411.000	1.058.411.000	511,857,000	511,857,000	511,857,000	223.857.000	-288.000.000
6.01.0 2.2.01. 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	81.237.000	81.237.000	81,237,000	81,237,000	81,237,000	81.237.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025					Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6.01.0 2.2.01. 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	9.823.500	9.823.500	9,823,500	9,823,500	9,823,500	9.823.500	-
6.01.0 2.2.01. 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	318.893.000	318.893.000	111,377,000	111,377,000	111,377,000	111.377.000	-
6.01.0 2.2.01. 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	16.669.500	16.669.500	16,669,500	16,669,500	16,669,500	16.669.500	-
6.01.0 2.2.01. 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	APBD Kota Denpasar	33.572.000	33.572.000	33,572,000	33,572,000	33,572,000	33.572.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
		Pemeriksaan APIP											
6.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	100%		85.320.000	85.320.000	85,320,000	85,320,000	85,320,000	85.320.000	-
6.01.0 2.2.02. 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	14.182.000	14.182.000	14,182,000	14,182,000	14,182,000	14.182.000	-
6.01.0 2.2.02. 0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	8 Laporan	APBD Kota Denpasar	71.138.000	71.138.000	71,138,000	71,138,000	71,138,000	71.138.000	-
6.01.0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Persentase OPD yang didampingi / yang	Persentase OPD yang didampingi / yang	80 %	80 %		2.237.850.000	2.237.850.000	1,404,719,000	1,404,719,000	1,404,719,000	1.413.719.000	9.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	mendapat pendampingan	mendapat pendampingan										
6.01.0 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100%	100%		48.846.000	48.846.000	48,846,000	48,846,000	48,846,000	48.846.000	-
6.01.0 3.2.01. 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomen- dasi	2 Rekomen- dasi	APBD Kota Denpasar	9.224.000	9.224.000	9,224,000	9,224,000	9,224,000	9.224.000	-
6.01.0 3.2.01. 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomen- dasi	2 Rekomen- dasi	APBD Kota Denpasar	39.622.000	39.622.000	39,622,000	39,622,000	39,622,000	39.622.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6.01.0 3.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100%	100%		2.189.004.000	2.189.004.000	1,355,873,000	1,355,873,000	1,355,873,000	1.364.873.000	9.000.000
6.01.0 3.2.02. 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	APBD Kota Denpasar	201.638.000	201.638.000	67,928,000	67,928,000	67,928,000	67.928.000	-
6.01.0 3.2.02. 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	APBD Kota Denpasar	51.907.000	51.907.000	51,907,000	51,907,000	51,907,000	51.907.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6.01.0 3.2.02. 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	APBD Kota Denpasar	1.512.252.000	1.512.252.000	1,000,682,000	1,000,682,000	1,000,682,000	1.009.682.000	9.000.000
6.01.0 3.2.02. 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampinga n, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	APBD Kota Denpasar	423.207.000	423.207.000	235,356,000	235,356,000	235,356,000	235.356.000	-
TOTAL							39.237.206.784	40.118.116.523	35.670.451.301	35.670.451.301	37.310.674.908	37.579.861.152	269.186.244

BAB IV PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan implementasi dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Denpasar disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan peningkatan peran dari Inspektorat dalam menghadapi tantangan Pemberantasan Korupsi. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Denpasar setiap tahun akan dievaluasi sebagai dasar penyusunan Perubahan Renja tahun berikutnya, sehingga hasil pencapaian dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya.

Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2025 ini dilaksanakan konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kota Denpasar untuk mampu meningkatkan kinerja dari proses yang merupakan *output* pengawasan dan sebagai dokumen Rencana Aksi yang memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Walikota serta mendukung arahan prioritas Pemerintah Daerah.

Inspektur Daerah Kota Denpasar



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

